

## PENDAHULUAN

Pelabuhan perikanan adalah pelabuhan yang secara khusus menampung kegiatan masyarakat perikanan baik dilihat dari aspek produksi, pengolahan maupun aspek pemasarannya. Berbeda dengan pelabuhan niaga umumnya, pelabuhan perikanan mempunyai ciri-ciri khusus yaitu bahwa selain memiliki fasilitas-fasilitas pokok dan fasilitas fungsional yang umum seperti dermaga, breakwater, alur pelayaran dan gedung-gedung perkantoran, peralatan navigasi, bengkel dan sebagainya, haruslah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang mutlak dibutuhkan bagi kelancaran aktivitas usaha perikanan seperti misalnya tempat pendaratan dan pelelangan ikan, cold storage, pabrik es, fishing gear workshop dan lain sebagainya (Murdiyanto, 1982).

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang Pelabuhan Perikanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta merupakan salah satu pusat kegiatan perikanan rakyat terbesar di Bali yang ditunjang oleh adanya industri pengalengan ikan dan tepung ikan yang jumlahnya mencapai 12 unit (di luar kompleks pelabuhan) dan industri rakyat berupa pengasinan/pengeringan ikan dengan komoditi utama/hasil tangkapan adalah ikan Lemuru (*Sardinella lemuru*). PPN Pengambangan sendiri mulai dibangun pada tahun 1976/1977 secara bertahap dikembangkan dan dilengkapi berbagai prasarana dan fasilitas darat yang dibangun antara lain Revetment, Gedung TPI, Bengkel,

Rumah Genset, Tower Air, WC Umum, Balai Pertemuan Nelayan, Kantor, Mess Operator, Gudang Es, Tempat Penimbangan Ikan, sarana peribadatan, Pavin Block, Jalan Lingkungan, Tempat Parkir, Drainase, dan Pagar Keliling.

Tujuan diadakannya Praktek Kerja Lapang (PKL) ini adalah untuk mempelajari dan mengetahui secara langsung pengelolaan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambangan, ditinjau dari fasilitas yang ada serta kondisi fasilitas-fasilitasnya.

## METODE

Praktek Kerja Lapang ini telah dilaksanakan pada bulan Mei 2013 di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambangan, Kabupaten Jembrana-Bali.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara dokumentasi, observasi, partisipasi aktif dan wawancara. Namun kegiatan praktek kerja lapang ini lebih ditekankan pada partisipasi aktif dalam mengikuti beberapa aktivitas yang ada di pelabuhan.

Dalam PKL ini data yang di ambil meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dipeoleh secara langsung dari hasil observasi, wawancara, partisipasi aktif dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari data primer yang telah diolah oleh pihak lain dan disajikan dalam bentuk tabel ataupun diagram.

### a. Observasi

Observasi dilakukan dengan pengambilan data secara langsung di lapang yaitu melalui pengamatan terhadap sistem

operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengembangan dan terhadap masyarakat nelayan setempat.

b. Wawancara

Wawancara yaitu dilakukan dengan wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang terkait (pegawai yang ada di instansi terkait) mengenai sistem operasi pelabuhan serta fasilitas-fasilitas yang terdapat di PPN Pengembangan. Selain itu juga dilakukan wawancara terhadap para nelayan yang berada di daerah setempat.

c. Partisipasi Aktif

Partisipasi aktif dilakukan dengan mengikuti beberapa aktivitas selama melakukan kegiatan praktek kerja lapang, seperti ikut melakukan pengawasan dengan menggunakan kapal syahbandar, terjun langsung dalam memantau kondisi fasilitas-fasilitas yang ada di PPN Pengembangan, membantu nelayan menurunkan jaring dan beberapa kegiatan lainnya.

d. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengambilan data dari laporan tahunan dan laporan bulanan perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengembangan, dan juga data dari profil Desa Pengembangan serta pengambilan foto langsung di lapang.

Sedangkan untuk data sekunder diambil dari laporan tahunan statistik perikanan, laporan monitoring di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengembangan, buku literatur serta kepustakaan yang menunjang dari praktek kerja lapang ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Keadaan Umum Lokasi

Kabupaten Jembrana adalah salah satu dari 9 (sembilan) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali. Luas Kabupaten Jembrana 84.180 Ha atau 14,96% dari luas wilayah Pulau Bali, yang terbagi menjadi 5 (lima) Kecamatan, diantaranya: Kecamatan Melaya, Negara, Jembrana, Mendoyo, dan Pekutatan. Secara geografis Kabupaten Jembrana terletak di sebelah barat Pulau Bali, membentang dari arah barat ke timur pada 8°09'30"–8°28'02" LS dan 114°25'53"–114°56'38" BT, dengan panjang pantai 76 Km. Topografi wilayah bervariasi dengan ketinggian 1.0 sampai ± 1000 m dpl, dengan kemiringan rata-rata lahan yaitu: datar (25,00 %), wilayah landai (10,16 %), wilayah berbukit (25,24 %) dan wilayah curam (39,60 %) dari luas wilayah.

### 2. Keadaan Penduduk

Menurut data dari Dinas Pertanian Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana, di Kabupaten Jembrana sebanyak 9,462 jiwa penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan. 46% dari jumlah tersebut merupakan nelayan PPN Pengembangan. Dari hasil survey yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa nelayan yang beroperasi di PPN Pengembangan berumur rata-rata antara 19-50 tahun, pendidikan rata-rata SD (sekolah dasar), agama yang dianut yaitu Islam 5.832 orang.

### 3. Sejarah Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan

Kegiatan Perikanan di Pengembangan telah dimulai sejak tiga puluhan tahun yang lalu. Pada mulanya berupa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang dibangun pada tahun 1976/1977. Secara bertahap

dikembangkan oleh *Fisheries Infrastructure Sector Project*, dan dilakukan studi kelayakan melalui *Roger Consulting Marine* pada tahun 1988.

Selanjutnya berdasarkan surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. B/2712/M.PAN/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 dilakukan peningkatan klas, dari Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pengembangan menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pengembangan.

Terakhir, berdasarkan surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. B.2672/M.PAN/9/2009 tanggal 11 September 2008, dilakukan lagi peningkatan klas dan diresmikan menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengembangan pada tanggal 6 Februari 2009.

#### **4. Fungsi dan Peran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan**

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPN Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi produksi dan pemasaran hasil Perikanan Tangkap di wilayahnya, pengawasan pemanfaatan sumberdaya penangkapan untuk pelestariannya, dan kelancaran kegiatan kapal perikanan, serta pelayanan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPN Pengembangan menyelenggarakan fungsi: Perencanaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian serta pendayagunaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan; Pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan; Pelayanan Jasa dan fasilitasi usaha perikanan; Pengembangan dan fasilitasi

penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat perikanan; Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di wilayahnya untuk peningkatan produksi, distribusi dan pemasaran hasil perikanan; Pelaksanaan Fasilitasi publikasi hasil riset, produksi dan pemasaran hasil perikanan di wilayahnya; Pelaksanaan fasilitasi pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari; Pelaksanaan pengawasan penangkapan sumberdaya ikan, dan penanganan, pengolahan, pemasaran, serta pengendalian mutu hasil perikanan; Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data perikanan, serta pengelolaan sistem informasi; Pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban, dan pelaksanaan kebersihan kawasan pelabuhan perikanan; serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengembangan berperan sebagai terminal yang menghubungkan segala jenis kegiatan di laut dan di darat dalam suatu sistem usaha yang berdaya guna tinggi. Mulai dari keberangkatan dari pelabuhan, suatu unit penangkapan di laut harus dilengkapi dengan bahan bakar, perbekalan makanan, es dan lain-lain. Setelah kapal merapat kembali di pelabuhan, dilakukan aktivitas pembakaran dan penjualan ikan hasil tangkapan ke pabrik-pabrik pengolahan yang ada di sekitar PPN Pengembangan dan dikirim ke luar daerah seperti Jawa dan Lombok sebagai bahan baku industri pengolahan ikan.

#### **5. Sarana dan Prasarana di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan**

Dalam rangka menunjang operasional PPN Pengembangan di butuhkan sarana dan prasarana yang meliputi fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang.

a. Fasilitas Pokok

Fasilitas pokok adalah fasilitas yang diperlukan untuk kepentingan keselamatan pelayaran dan juga tempat berlabuh, bertambat serta bongkar muat sehingga kapal aman keluar masuk pelabuhan. Fasilitas pokok yang terdapat di PPN Pengambangan diantaranya: *breakwater*, dermaga, *revetment*, *jetty*, kolam pelabuhan, jalan di kompleks pelabuhan, *drainase* dan areal daratan pelabuhan.

b. Fasilitas Fungsional

Fasilitas fungsional adalah fasilitas yang berfungsi meningkatkan nilai guna dari fasilitas pokok dengan cara memberikan pelayanan yang dapat menunjang aktivitas di pelabuhan. Kegiatan operasional pelabuhan seperti bongkar-muat, operasi kapal-kapal nelayan, penanganan hasil perikanan, tidak akan berjalan tanpa adanya fasilitas fungsional. Fasilitas fungsional yang terdapat di PPN Pengambangan diantaranya: TPI, tower dan pompa air, daya listrik, SPBN, bengkel, bangsal perbaikan jaring, gudang peralatan, kantor pelabuhan, kantor bina mutu dan kapal syahbandar.

c. Fasilitas Penunjang

Fasilitas penunjang adalah fasilitas yang secara tidak langsung meningkatkan peranan pelabuhan atau para pelaku mendapatkan kenyamanan melakukan aktivitas di pelabuhan. Fasilitas penunjang yang terdapat di PPN Pengambangan yaitu: balai pertemuan nelayan, rumah dinas, pos jaga, pos pelayanan terpadu, pura, MCK dan waserda/toko.

**6. Kondisi Fasilitas PPN Pengambangan**

Secara garis besar sarana dan prasarana di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambangan dapat dibedakan menjadi fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas

penunjang. Sampai dengan bulan Mei 2013 kondisi sarana dan prasarana yang terdapat di areal Pelabuhan Pengambangan adalah sebagai berikut.

**Tabel 1. Kondisi Fasilitas di PPN Pengambangan**

No	JENIS FASILITAS	KAPASITAS/UKURAN	KONDISI
<b>I. FASILITAS POKOK</b>			
1	Areal Pelabuhan (Lahan)	9.1 Ha	Baik
2	Dermaga	171 m x 6 m	Baik
3	Jetty (2 buah)	70 m x 4 m	Baik
4	Pemecah Gelombang ( <i>Breakwater</i> )	Kanan: 743 m Kiri: 884 m	Baik
5	Kolam Pelabuhan	20 Ha	Terdapat Pendangkalan 120,000 m <sup>3</sup>
6	Dinding Penahan Tanah ( <i>Revetment</i> )	300 m	Baik
7	Jalan Lingkungan	5.435 m <sup>2</sup>	Baik
8	<i>Drainase</i>	1.082 m <sup>2</sup>	Baik
<b>II. FASILITAS FUNGSIONAL</b>			
1	Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	320 m <sup>2</sup>	Baik
2	Tower dan Pompa Air	6 m <sup>2</sup> dan 18 m <sup>2</sup>	Baik
3	Daya Listrik	48 Kva	Baik
4	SPBN	20 Ton/Hari	Baik
5	Bengkel	110 m <sup>2</sup>	Baik
6	Bangsal Perbaikan Jaring	400 m <sup>2</sup>	Baik
7	Gudang Peralatan	30 m <sup>2</sup>	Baik
8	Kantor Pelabuhan	240 m <sup>2</sup>	Baik
9	Kantor Bina Mutu	100 m <sup>2</sup>	Baik
10	Kapal Syahbandar	1 unit	Baik
<b>III. FASILITAS PENUNJANG</b>			
1	Balai Pertemuan Nelayan	250 m <sup>2</sup>	Baik
2	Rumah Dinas	246 m <sup>2</sup>	Baik
3	Pos Jaga	27 m <sup>2</sup>	Baik
4	Pos Pelayanan Terpadu	54 m <sup>2</sup>	Baik
5	Tempat Peribadatan (Pura)	4 m <sup>2</sup>	Baik
6	MCK	27 m <sup>2</sup>	Baik
7	Waserda/toko	288 m <sup>2</sup>	Baik

Dari tabel di atas terlihat bahwa kondisi fasilitas-fasilitas yang ada di PPN Pengembangan, baik fasilitas pokok, fasilitas fungsional maupun fasilitas penunjang dalam kondisi baik, kecuali kolam pelabuhan pada fasilitas pokok yang mengalami pendangkalan dan perlu dilakukan pengerukan.

#### 7. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

Dalam rangka mewujudkan visi sebagai **”Pusat Pengembangan, Pengusahaan, Pengelolaan Perikanan Terpadu yang Berkesinambungan dan Dapat Mensejahterakan Masyarakat”**, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengembangan melakukan kegiatan peningkatan fasilitas pelabuhan yang diprioritaskan pada pembangunan fisik yang diarahkan pada pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Sebagai Unit Pelaksanaan Teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jendral Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPN Pengembangan dikelola langsung oleh Pemerintah Pusat kecuali TPI yang dikelola oleh Pemerintah Daerah setempat.

Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana PPN Pengembangan dalam rangka penyediaan fasilitas yang memadai untuk aktivitas perikanan yang efektif dan efisien dilakukan secara bertahap sejalan dengan Rencana Strategik yang telah disusun sebagai acuan dalam menetapkan program dan kegiatan. Untuk menunjang berbagai pembangunan fasilitas, PPN Pengembangan juga memberlakukan pelayanan jasa pelabuhan yang merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa: jasa tambat labuh, jasa

pas masuk, jasa kebersihan, jasa listrik, jasa sewa lahan dan gedung.

Berhasilnya pengelolaan suatu pelabuhan antara lain bergantung kepada pelaku-pelaku yang ada di pelabuhan, misalnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusianya, adanya hubungan baik antara pengelola pelabuhan, pedagang, nelayan, pengolah dan buruh. Pelaku-pelaku tersebut harus dapat bekerja secara profesional, bekerja sama dan patuh terhadap peraturan yang berlaku.

Pada dasarnya terdapat empat tipe pengelolaan pelabuhan, dimana masing-masing tipe mempunyai pola yang berbeda menurut Lubis (2006) yaitu:

##### (1) Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan pengelola pelabuhan sekaligus pemiliknya. Biaya pengoperasian pelabuhan dapat ditunjang oleh pemerintah daerah tidak terkecuali dalam hal-hal tertentu seperti perbaikan dan perluasan dermaga ada juga bantuan finansial dari pemerintah pusat.

##### (2) Pengelolaan oleh Perusahaan Umum (Semi Publik)

Pengelolaan pelabuhan dilakukan oleh perusahaan umum yang dipercayakan oleh pemerintah setempat. Pelayanan umum dapat porsi yang layak dalam pengelolaan tipe ini. Anggaran tidak lagi merupakan bagian anggaran pemerintah daerah tapi dari pelabuhan sendiri.

##### (3) Pengelolaan oleh Pemerintah Pusat

Pengelola dan pemilik pelabuhan ini adalah pemerintah pusat. Fasilitas yang ada sifatnya milik umum dan dikelola oleh wakil-wakil yang ditunjuk pemerintah pusat dan bertanggung jawab langsung kepadanya.

#### (4) Pengelolaan oleh Swasta

Infrastruktur dibangun oleh perusahaan swasta sendiri atau sebagian mendapatkan bantuan pembiayaan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Pelabuhan ini dikelola oleh suatu perusahaan swasta atau satu grup swasta yang bertujuan untuk mencari keuntungan sematamata, dalam hal ini kepentingan umum terabaikan, hanya pelayanan atau kegiatan yang memberikan keuntungan saja dilakukan sedangkan kegiatan yang tidak menguntungkan meskipun diperlukan oleh masyarakat tidak dilakukan.

pelabuhan, kantor bina mutu, gudang peralatan dan kapal syahbandar. Sedangkan fasilitas penunjang yang dimiliki diantaranya: balai pertemuan nelayan, rumah dinas, pos jaga, pos pelayanan terpadu, tempat peribadatan (pura), MCK dan waserda/toko.

- ❖ Kondisi fasilitas di PPN Pengambangan dikategorikan baik, kecuali kolam pelabuhan yang mengalami pendangkalan dan perlu dilakukannya pengerukan. Kondisi fasilitas-fasilitas yang terdapat di PPN Pengambangan tergolong baik dikarenakan adanya perhatian dari pihak PPN Pengambangan untuk melakukan perawatan dan perbaikan-perbaikan tiap tahunnya. Namun ada beberapa fasilitas yang belum dimiliki oleh PPN Pengambangan yaitu: *groin* (penahan sedimen), pengolahan limbah, *dock/slipway*, rambu-rambu navigasi, pabrik es dan beberapa fasilitas fungsional lainnya.
- ❖ Agar pengoperasian dapat berjalan sesuai fungsinya pelabuhan perikanan harus memperhatikan pengorganisasian dan pengelolaan pelabuhan dengan baik. PPN Pengambangan sendiri dikelola oleh Pemerintah Pusat kecuali TPI yang dikelola oleh Pemerintah Daerah setempat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Lapangan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan, Kabupaten Jembrana-Bali dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- ❖ Untuk menunjang berbagai kegiatan yang ada di PPN Pengambangan agar dapat memenuhi fungsinya, PPN Pengambangan dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana yaitu: fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang.
- ❖ Fasilitas pokok yang dimiliki PPN Pengambangan diantaranya: areal pelabuhan (lahan), dermaga, *jetty* (2 buah), pemecah gelombang (*breakwater*), kolam pelabuhan, dinding penahan tanah (*revetment*), jalan lingkungan dan *drainase*. Adapun fasilitas fungsional yang dimiliki yaitu: Tempat Pelelangan Ikan (TPI), tower dan pompa air, daya listrik, SPBN, bengkel, bangsal perbaikan jaring, kantor

### 2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam kegiatan PKL ini adalah sebagai berikut:

- ❖ Meningkatkan pemanfaatan dan pelayanan fasilitas-fasilitas di PPN Pengambangan sehingga dapat memberikan hasil yang optimal terhadap manfaat fasilitas yang ada di PPN Pengambangan.

- ❖ TPI harus memperhatikan dan meningkatkan cara penanganan ikan agar kualitas dan mutu ikan lebih baik.
- ❖ Fungsi dan peran PPN Pengabangan lebih ditingkatkan terutama sistem lelang dan pola pemasaran perlu ditunjang dengan peningkatan mutu hasil tangkapan dan produk olahan.
- ❖ Pihak pelabuhan harus segera melakukan pengerukan kolam pelabuhan yang mengalami pendangkalan agar dapat disinggahi kapal ukuran > 30 GT.
- ❖ Nelayan harus dapat memanfaatkan fungsi fasilitas yang ada, seperti TPI sebagai tempat pelelangan ikan, bangsal jaring sebagai tempat perbaikan jaring agar fasilitas yang ada tidak hanya sebagai formalitas fasilitas pelabuhan saja, namun dapat dimanfaatkan secara optimal oleh nelayan agar lebih bermanfaat sebagaimana fungsi dari fasilitas-fasilitas tersebut.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Selesainya artikel ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya
2. Ibu dan Bapak serta keluarga saya yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk apapun
3. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang
4. Dr. Ir. Daduk Setyohadi, MP selaku ketua jurusan PSPK
5. Ir. Martinus, MP selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan

sebagian waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan

6. Sahabat dan teman-teman saya serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memeberikan dukungan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dyah, S. 2005. Modul untuk Pngembangan Mata Kuliah Manajemen Pelabuhan Perikanan. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ginting, R.F.N. 2011. *Kondisi dan Potensi Kepelabuhan Perikanan di Kabupaten Subang*. IPB. Bogor.
- Lubis, E. 2006. Pengantar Pelabuhan Perikanan. Bahan Kuliah Pelabuhan Perikanan. Laboratorium Pelabuhan Perikanan. Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor.
- Murdiyanto, B. 1982. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Laut di Indonesia. IPB. Bogor.
- Patilima, H. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. CV. Alfabeta. Bandung.
- Santosa, A.W.B. 2005. *Kajian Optimasi Fasilitas Pelayanan Bongkar Muatan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan*. Universitas Diponegoro. Semarang.